



Massa Datangi Kantor KPU

JOGJA, BERNAS -- Forum Pengawal Demokrasi Indonesia melakukan aksi unjuk rasa terkait permasalahan 14.000 surat suara tidak sah atau rusak pada Pilwaktog Yogyakarta 2017. Koordinator Aksi Forum Pengawal Demokrasi Indonesia, Fokki Ardianto, menyebutkan dua tuntutan utama dari massa aksi, Senin (20/2).

Massa pendukung paslon Imam Priyono-Ahmad Fadli itu menuntut agar membuka kotak suara yang berisi surat suara rusak atau tidak sah sekaligus meminta agar ditelusuri satu per satu. Massa aksi juga meminta agar sebelum rapat pleno rekapitulasi, seluruh kotak suara diamankan di Mapolresta Yogyakarta.

"Kami menuntut pada tanggal 22 Februari besok, kotak suara yang berisi surat suara

rusak dibuka, sekali lagi dibuka. Kedua, karena sebagian besar masyarakat Jogja krisis kepercayaan kepada institusi KPU, kami meminta agar kotak suara diamankan di kantor polisi," kata Fokki, saat berorasi di hadapan ratusan massa yang mendatangi kantor KPU Kota Yogyakarta.

Fokki menyebutkan kedua tuntutan tersebut merupakan bentuk sikap pasangan calon nomor urut satu yang tidak mem-

► ke hal 7

Massa Datangi

Sambungan dari hal 1

percaya kredibilitas KPU dan penyelenggara pemilu lainnya di Kota Yogyakarta. "Alasan prinsip kenapa kami mendatangi KPU, karena kami tidak percaya pada netralitas KPU. Salah satu alasan riil sangat jelas, ketika saksi-saksi kami di tingkatan PPK yang meminta agar kotak suara yang berisi surat suara rusak, tapi ditolak," ungkap anggota DPRD Kota Yogyakarta itu.

Kasus tersebut terjadi di beberapa TPS, di antaranya TPS di Kecamatan Danurejan dan TPS di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede. Sementara terkait permintaan memindahkan kotak suara ke Mapolresta, Fokki ber alasan hal tersebut untuk mencegah penyelewengan surat suara.

"Ada alasan yang mendasar, ketika hari Sabtu (18/2) kemarin, kita menanyakan sistem keamanan di KPU berkaitan dengan kotak suara, dan kita meminta agar saksi dari kedua pasangan calon berjaga di situ ternyata ditolak. Kemudian saat kita meminta untuk dipasang CCTV, ternyata belum juga dipasang, dan baru dipasang saat kita sudah menyampaikan protes," terangnya.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto, menyatakan selama ini selalu menjaga netralitas dan bersikap imparial serta independen selama pemilu. Ia menyebutkan tuduhan ketidaknetralan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pemungutan suara, Rabu (15/2) pekan kemarin, tidak berdasar.

"Kami bekerja dilihat oleh masyarakat logis. Kami bekerja dipantau oleh pengawas pemilu dan juga pemantau dari mana pun. Oleh sebab itu, kami tidak ingin main-main, apalagi main mata terkait penyelenggaraan pemilu saat ini. Saya juga orang asli Jogja dan saya ingin pemilu berjalan sukses. Saya tidak ingin menciderai pemilu dan tetap menginginkan agar Jogja tetap istimewa," ungkap Wawan.

Sesuai Aturan

Wawan menjelaskan, KPU Kota Yogyakarta hanya akan membuka kotak suara atau mengadakan pemungutan suara ulang jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

"Kami tidak pernah menghalangi-halangi penghitungan ulang atau pembukaan kotak suara sepanjang ada hal-hal yang memperbolehkan keadaan tersebut sesuai dengan Undang-Undang. Silahkan ajukan bukti-bukti yang jelas agar kami bisa menelusuri mana yang salah, dan Panwas juga bisa memberi rekomendasi. Selama tidak ada bukti tersebut, apa dasar kami (membuka kotak suara)," paparnya.

Sesuai pasal 33 Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2006, Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto, menjelaskan penyelenggara pemilu harus

mengamankan seluruh kotak suara dan logistik pemilu. "Kami juga harus pastikan bahwa kami benar-benar menjaga kotak suara itu," ujarnya.

Wawan menyontohkan pada penghitungan suara di tingkat kecamatan, PPK pernah membuka kotak suara dengan rekomendasi Panwasacam. Saat itu, saksi dari masing-masing paslon meminta agar kotak suara tidak sah dibuka untuk memastikan surat suara tersebut.

"Kemarin ada beberapa teman PPK yang membuka itu atas dasar permintaan saksi. Jadi tidak ada penyelenggara pemilu yang menghalangi-halangi," katanya.

Setelah melakukan diskusi dengan massa pendemo, KPU Kota Yogyakarta tetap memutuskan kotak suara dan logistik disimpan di tempat penyimpanan milik KPU dengan catatan memperkuat pengamanan dari aparat kepolisian.

Kabag Ops Polresta Yogyakarta, Kompol Adije Hartanto, menyatakan akan mengerahkan lebih banyak personel pada rapat pleno rekapitulasi akhir penghitungan suara, Rabu (22/2) besok, di KPU Kota Yogyakarta. Hal itu setelah melihat tensi yang meningkat akibat kekecewaan pasangan calon (paslon) nomor satu.

"Secara keamanan kita sudah siapkan untuk pengamanan, ya sekitar 500 orang dan bisa bertambah menjadi 600 orang. Tapi kita bisa all out juga nanti," laza Adije.

Kepolisian sampai saat ini masih menunggu hasil analisis Bid Intel Polresta terkait proyeksi kondisi kamtibmas saat pleno rekapitulasi di KPU. Jika seluruh personel dikerahkan, lebih dari 1.000 personel akan diturunkan pada Rabu besok.

"Lihat perkembangan dan informasi dari rekan-rekan fungsi intel. Kalau dirasa masanya banyak, ya seumpamanya, kita akan all out juga," katanya kepada Bernas.

Sedangkan Komandan Brimob Polda DIY, Kombes Polisi Dadang Rahardja, menyatakan siap memberikan bantuan kepada Polresta agar pengamanan Pilkada dapat berjalan lancar.

"Kalau kerawanan sih kami berharap tidak ada ya. Cuma, kami disini, satu mengamankan KPU,

kedua mengamankan proses penghitungan suara," tutur Dadang. Satupastikan Brimob setingkat kompi sudah diperbantukan untuk Polresta Yogyakarta.

Meski demikian, Dadang mengakui akan menambah kekuatan untuk pengamanan pada saat proses rekapitulasi yang diperkirakan akan memanas.

"Ya kalau tambahan ada 150 personel yang akan kita perbantukan lagi. Tapi, dengan catatan jika diperlukan," paparnya. (ros)

www.6

http://cek.harianbernas.com/25087



DATANGI KPU - Massa Forum Pengawal Demokrasi Indonesia mendatangi Kantor KPU Kota Yogyakarta, Senin (20/2) siang, menuntut transparansi KPU dalam proses penghitungan suara. Massa pendukung paslon nomor satu itu mempertanyakan banyaknya surat suara tidak sah dalam Pilwali 2017 kali ini.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005